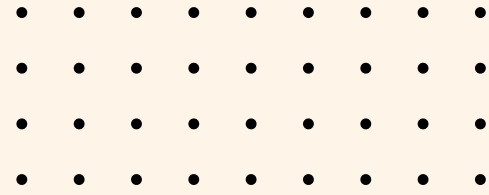


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

TAHUN 2025





BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan *Rencana Kerja Tahun 2025* merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah. *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memuat penjabaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. *Rencana Kerja* yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 6 Maret 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



MARDIASIH, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 199703 2002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	50
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	57
2.3.1 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	58
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pendapatan Daerah.....	61
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	62
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	64
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2025	67
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	82



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berkeadilan Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	82
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	84
3.3 Program dan Kegiatan.....	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	94
BAB V PENUTUP.....	101





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berkeadilan Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah.....	27
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Mojokerto.....	31
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Badan Pendapatan Daerah	50
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025	69
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	80



**#bangga
melayani
bangsa**



Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memuat program, kegiatan dan subkegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan; penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; pembahasan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk tahun Ke empat periode Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Pendapatan Dearah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pendapatan



Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025, Renstra Badan Pendapatan Daerah, Renja Kementerian Keuangan dan Renja Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dilakukan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan *Rancangan Awal* Renja **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 - 2029;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,



Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;

30. Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Dearah adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pendapatan Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana



Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berkeadilan Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan



subkegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan subkegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan subkegiatan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah dari hasil evaluasi yang tidak melebihi target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah,
Dengan target kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 84,40 dan realisasi 84,65 dan realisasi anggaran sebesar 81,41%;
Kegiatan dan subkegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini mempunyai indikator kegiatan yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 79,54%.
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Dengan target output 48 orang ASN dan terealisasi 45 ASN dikarenakan ada beberapa ASN yang dimutasi ke perangkat daerah lain.

Realisasi keuangan subkegiatan ini sebesar 79,54% dikarenakan ada sisa lebih gaji ASN yang mutasi tadi dan juga sisa lebih anggaran insentif yang tidak dapat direalisasikan karena tidak tercapai tahapan pendapatannya.

2) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dengan target output 4 ASN yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ternyata belum ada undangan penawaran pendidikan pelatihan yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah sehingga realisasi anggaran subkegiatan ini 0%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan target kinerja 100% terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 88,41%.

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan ini mempunyai output 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar 71,02%. Hal ini dikarenakan pembayaran berdasarkan tagihan yang tertera saja.

2. Program Pengelolaan Pendapatan

Program tersebut tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan karena dengan indikator program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang di tahun 2023 ini hanya mencapai 97,39% sehingga tidak dapat mencapai angka target 100% dan dengan realisasi anggaran sebesar 95,64%



dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala di beberapa perangkat daerah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dengan BPKAD Kab. Mojokerto tanggal 11 Januari 2024, maka bersama ini disampaikan laporan realisasi penerimaan PAD sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 656.067.091.001,54 atau (97,39%) dari target sebesar Rp. 673.662.919.222,09 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Per Kelompok Pendapatan

NO	U R A I A N	TARGET PAD P-APBD T.A 2023	REALISASI	SISA	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	673,662,919,222.09	656,067,091,001.54	17,595,828,220.55	97.39%
1	PAJAK DAERAH	391,174,190,020.00	369,537,744,691.00	21,636,445,329.00	94.47%
2	RETRIBUSI DAERAH	37,804,816,399.00	31,115,343,163.76	6,689,473,235.24	82.31%
3	HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10,417,837,280.09	10,417,837,280.95	(0.86)	100.00%
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	234,266,075,523.00	244,996,165,865.83	(10,730,090,342.83)	104.58%

2. Realisasi Penerimaan per Perangkat Daerah Penghasil

NO	U R A I A N	TARGET PAD 2023	REALISASI	SISA (Lebih/Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	673,662,919,222.09	656,067,091,001.54	17,595,828,220.55	97.39%
1	DINAS PERTANIAN	1,000,000,000.00	1,540,387,100.82	(540,387,100.82)	154.04%
2	BPKAD	5,007,720,323.00	6,673,479,192.03	(1,665,758,869.03)	133.26%
3	DINAS TENAGA KERJA	2,501,042,400.00	3,281,058,100.00	(780,015,700.00)	131.19%
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,861,480,000.00	3,438,211,067.00	(576,731,067.00)	120.15%
5	RSUD. PROF. DR. SOEKANDAR	115,000,000,000.00	128,857,956,697.36	(13,857,956,697.36)	112.05%
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	100,000,000.00	100,500,600.00	(500,600.00)	100.50%
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	10,417,837,280.09	10,417,837,280.95	(0.86)	100.00%
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	942,085,000.00	942,085,000.00	-	100.00%
9	DINAS PENDIDIKAN	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
10	DINAS KESEHATAN	48,474,905,000.00	48,014,980,743.44	459,924,256.56	99.05%
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	391,715,867,220.00	370,987,401,773.00	20,728,465,447.00	94.71%
12	RSUD. R.A. BASOENI GEDEG	65,000,000,000.00	59,743,497,151.00	5,256,502,849.00	91.91%
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,884,137,840.00	3,467,359,130.40	416,778,709.60	89.27%
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	7,500,053,200.00	6,145,932,206.79	1,354,120,993.21	81.95%
15	DINAS KEBUDAYAAN,KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN P	13,166,034,000.00	8,698,945,147.00	4,467,088,853.00	66.07%
16	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	6,064,756,959.00	3,730,459,811.75	2,334,297,147.25	61.51%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	0.00%

Dari data di atas dapat kita uraikan sebagai berikut :

Terdapat 7 (tujuh) OPD yang belum bisa mencapai 100% dengan alasan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.730.459.811,75 atau (61,51%) kurang Rp. 2.334.297.147,25 dari target Rp. 6.064.756.959.

Dikarenakan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini menggunakan SIMBG, yang didalamnya harus sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan pengajuan/permohonan PBG banyak yang terkendala RTRW sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hal ini menyebabkan minimnya realisasi PBG.

2. *Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata*

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 8.698.945.147 atau (66,07%) kurang Rp. 4.467.088.853 dari target Rp. 13.166.034.000.

Dikarenakan :

- a. Banyaknya wisata baru yang bermunculan seperti desa wisata dan wisata yang dikelola Swasta sehingga mengurangi kunjungan ke wisata yang di kelola pemerintah dan berdampak pada perolehan PAD.
- b. Objek Wisata yang dikelola oleh Pemkab belum ada inovasi yang signifikan, yang mampu menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.

3. *Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan*

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.145.932.206,79 atau (81,95%) kurang Rp. 1.354.120.993,21 dari target Rp. 7.500.053.200.

Hal ini dikarenakan :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga berpengaruh pada retribusi parkir



berlangganan realisasinya jadi menurun, walaupun sudah ada himbauan pemutihan.

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.

c. Retribusi Terminal

Jumlah kendaraan angkutan umum Mobil Penumpang Umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang, dan banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan Retribusi Terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Banyak bermunculan tempat wisata baru yang dikelola swasta sehingga berpengaruh pada Retribusi Tempat Khusus Parkir pada obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemkab. Mojokerto karena pengunjungnya berkurang.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.467.359.130,40 atau (89,27%) kurang Rp. 416.778.709,60 dari target Rp. 3.884.137.840

Hal ini dikarenakan :

- Adanya pasar *online* yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar tradisional semakin menurun
- Banyak kios/los di pasar yang buka tutup karena kurangnya pembeli terutama untuk jenis dagangan yang menyediakan kebutuhan tambahan, seperti : konveksi, Sepatu/sandal, gerabah, elektronik, dll



5. RSUD RA. Basoeni

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 59.743.497.151 atau (91,91%) kurang Rp. 5.256.502.849 dari target Rp. 65.000.000.000.

Hal ini dikarenakan :

Layanan Hemodialisa dan Poli Bedah Syaraf yang belum beroperasi sehingga mempengaruhi penerimaan BLUD di RSUD RA. Basoeni belum memenuhi target.

6. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 370.987.401.773 atau (94,71%) kurang Rp. 20.728.465.447 dari target Rp. 391.715.867.220.

Hal ini dikarenakan :

1. BPHTB :

- a. Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi.
- b. Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan.

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

- a. Adanya piutang/tunggakan yang tidak terbayar/tertagih.
- b. Belum terealisasinya pemungutan Pajak Minerba dari Penambang tidak berijin (Illegal).

3. Pajak Hiburan :

- a. Proyeksi Potensi baru Objek Pajak Hiburan TA. 2023 belum bisa dipungut secara optimal.
- b. Objek Pajak Hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional



7. Dinas Kesehatan

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 48.014.980.743,44 atau (99,05%) kurang Rp. 459.924.256,56 dari target Rp. 48.474.905.000.

Dikarenakan jumlah kepesertaan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) menurun drastis sehingga mengakibatkan dana kapitasi ikut menurun.

Dalam program Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut terdapat kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Indikator kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Persentase peningkatan potensi PAD dengan target 3% tercapai 3%, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dengan target 4% tercapai 4% dan Persentase penerimaan pajak daerah yang di tahun 2023 ini dengan target 100% hanya mencapai 94,67% dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala sebagai berikut :

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan realisasi sebesar Rp 20.007.454.500,00 atau 56,44% kurang sebesar Rp 15.442.545.500 dari target sebesar Rp. 35.450.000.000,00 dikarenakan :

- a. Adanya piutang/ tunggakan yang tidak terbayar atau tertagih.
- b. Belum terealisasinya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari penambang tidak berijin/ illegal.

2. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp. 1.697.996.837,00 atau (84,90%) kurang sebesar Rp. 302.003.163,00 dari target Rp. 2.000.000.000,00



dikarenakan :

- a. Proyeksi Potensi baru Objek Pajak Hiburan TA. 2023 belum bisa dipungut secara optimal.
 - b. Objek Pajak Hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional.
3. BPHTB dengan realisasi sebesar Rp. 62.226.504.867,00 atau (85,24%) kurang sebesar Rp. 10.773.495.133 dari target sebesar Rp. 73.000.000.000,00 dikarenakan :
- a. Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi
 - b. Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan indikator kegiatan Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan sebanyak 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Dengan target indikator kinerja Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 terealisasi sebanyak 3 dan realisasi keuangan sebesar 100%.

b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan target indikator kinerja Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 terealisasi sebanyak 6 dan realisasi keuangan sebesar 100%.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97,66%.

a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 dan terealisasi 6 dengan realisasi keuangan sebesar 96,57%.

b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 3 dan terealisasi 3 dengan realisasi keuangan sebesar 99,93%.

c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 96 dan terealisasi 96 dengan realisasi keuangan sebesar 98,78%.



d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 dan terealisasi 2 dengan realisasi keuangan sebesar 97,99%.

e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 12 dan terealisasi 12 dengan realisasi keuangan sebesar 99,18%.

f. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 3 dan terealisasi 3 dengan realisasi keuangan sebesar 98,58%.

g. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 dan terealisasi 12 dengan realisasi keuangan sebesar 97,16%.

h. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 dan terealisasi 12 dengan realisasi keuangan sebesar 96,32%.



3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,44%.

a. Subkegiatan Pengadaan Mebel

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah waktu pengadaan Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 1 dan terealisasi 1 dengan realisasi keuangan sebesar 99,44%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88,41%.

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 dan terealisasi 12 dengan realisasi keuangan sebesar 98,32%.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



sebanyak 100% dan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,22%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 102 dan terealisasi 102 dengan realisasi keuangan sebesar 98,93%.

- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 229 dan terealisasi 229 dengan realisasi keuangan sebesar 99,94%.

- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 8 dan terealisasi 8 dengan realisasi keuangan sebesar 99,09%.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Persentase peningkatan potensi PAD dengan target 3% capaian 3%, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dengan target 4% capaian 4% dan Persentase penerimaan pajak daerah dengan target 100% capaian 94,47%.



a. Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 2 dan terealisasi 2 dengan realisasi keuangan sebesar 88,50%.

b. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 6 dan terealisasi 6 dengan realisasi keuangan sebesar 98,91%.

c. Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 4 dan terealisasi 4 dengan realisasi keuangan sebesar 96,15%.

d. Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 2 dan terealisasi 2 dengan realisasi keuangan sebesar 77,59%.

e. Subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebanyak 12 dan terealisasi 12 dengan realisasi keuangan sebesar 81,62%.



Beberapa program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang memadai
2. Adanya dukungan sarana prasarana sesuai yang memadai/sesuai kebutuhan
3. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 2 dan terealisasi 3 dengan realisasi keuangan sebesar 86,77%.
 - b. Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sebanyak 23.100 dan terealisasi 28.339 dengan realisasi keuangan sebesar 96,39%.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

- c. Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sebanyak 150.000 dan terealisasi 151.529 dengan realisasi keuangan sebesar 99,78%.
- d. Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 630.500 dan terealisasi 637.209 dengan realisasi keuangan sebesar 98,96%.
- e. Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebanyak 11.000 dan terealisasi 11.853 dengan realisasi keuangan sebesar 94,40%.
- f. Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi sebanyak 245 dan terealisasi 247 dengan realisasi keuangan sebesar 86,80%.
- g. Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebanyak 170 dan terealisasi 177 dengan realisasi keuangan sebesar 99,97%.
- h. Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



Subkegiatan ini mempunyai target indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 130 dan terealisasi 211 dengan realisasi keuangan sebesar 95,08%.

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang mencukupi
2. SDM berkompeten dan berkinerja tinggi dalam melakukan rekonsiliasi data dan evaluasi penerimaan pajak daerah
3. Kerjasama tim yang baik dalam setiap kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi
4. Disiplin dalam bekerja sesuai jadwal rekonsiliasi dan melaksanakan evaluasi penerimaan dengan bank secara rutin

2.1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan

Tabel berikut merupakan rangkuman dari beberapa factor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian yang melebihi target kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.



Tabel 2. 1

**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian
Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan
Badan Pendapatan Daerah**

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan /Subkegiatan Melebihi Target
1.	1. Adanya mutasi pegawai (ASN) yang mempengaruhi belanja gaji dan tunjangan pegawai tidak mencapai output yang ditetapkan dan juga sisa lebih anggaran insentif yang tidak dapat direalisasikan karena tidak tercapai target tahapan pendapatannya. 2. Belum ada undangan penawaran pendidikan pelatihan yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah 3. Pembayaran internet berdasarkan pada tagihan yang tertera sesuai pemakaian. 4. Ada 7 (tujuh) perangkat daerah yang tidak memenuhi target yang ditetapkan sehingga	1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang memadai; 2. Adanya dukungan sarana prasarana sesuai yang memadai/sesuai kebutuhan; 3. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan	1. Kegiatan direncanakan dengan tepat sasaran yang didukung dengan anggaran yang mencukupi; 2. SDM berkompeten dan berkinerja tinggi dalam melakukan rekonsiliasi data dan evaluasi penerimaan pajak daerah; 3. Kerjasama tim yang baik dalam setiap kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi 4. Disiplin dalam bekerja sesuai jadwal rekonsiliasi dan melaksanakan evaluasi penerimaan dengan bank



No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan /Subkegiatan Melebihi Target
	pencapaian program Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak mencapai 100% dari target. 5. Piutang yang masih belum dapat terbayar dari wajib pajak 6. Belum terealisasinya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari penambang tidak berijin/ illegal. 7. Proyeksi Potensi baru Objek Pajak Hiburan TA. 2023 belum bisa dipungut secara optimal. 8. Objek Pajak Hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional. 9. Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi. 10. Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan		secara rutin Disiplin dalam bekerja sesuai jadwal rekonsiliasi dan melaksanakan evaluasi penerimaan dengan bank secara rutin



No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Melebihi Target
	Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan		

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Sebagai implikasi dari belum optimalnya pencapaian program/kegiatan tersebut diatas membuat beberapa rencana target capaian kegiatan yang tertera di Rencana Strategis belum juga dapat dicapai optimal, dan tentu saja ini mempengaruhi target pencapaian renstra untuk tahun berikutnya, namun tidak terlalu signifikan mempengaruhi terhadap pencapaian renstra secara keseluruhan.

Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan serta untuk meminimalisir



implikasi yang timbul terhadap capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Membantu mendorong terwujudnya SDM agar memiliki pola pikir kreatif, inovatif dan terampil yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan pengelolaan pendapatan dan keuangan perangkat daerah sehingga mampu dan mau bekerja sama dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mencapai target yang diharapkan serta adanya perencanaan yang matang baik perencanaan kegiatan maupun anggaran sehingga terjadi sinkronisasi antar target dan realisasi.
2. Membantu mendorong perangkat daerah penghasil untuk lebih berkomitmen dalam pencapaian target perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan melakukan inovasi dan evaluasi secara bersama-sama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah										lembar:...																			
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes// Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan																		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																	
1				2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)							
5																													
5				0 1																									
5				0 1		0 1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,85		84,62		84,40		84,65		0,30%		84,80		-		-	



				Daerah Kabupaten/Kota									
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,14%	-



				Daerah	administrasi keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	-	-	-	-	-
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	-	48 Orang	48 Orang	100%	48 Orang	48 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pengadaan peralatan dan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-



					perlengkap n kantor yang disediakan								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap n Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	1 Paket	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket Bahan Logistik	-	96 Paket Bahan Logistik	96 Paket Bahan Logistik	100%	66 Paket Bahan Logistik	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-

[illegible]



				Disediakan								
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket Bahan/Material	-	3 Paket Bahan/Material	3 Paket Bahan/Material	100%	2 Paket Bahan/Material	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu Penyelenggaraan Rapat	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-



					Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-



				Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan	3 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	58 Paket	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	-



				Listrik yang Disediakan								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Kendaraan Dinas	-	102 Kendaraan Dinas	102 Kendaraan Dinas	100%	127 Kendaraan Dinas	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Peralatan dan Mesin	-	229 Peralatan dan Mesin	229 Peralatan dan Mesin	100%	102 Peralatan dan Mesin	-	-



				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00%	109,77%	100,00%	97,39%	97,39%	100,00%	-	-
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi PAD, Persentase Peningkatan Potensi	3%; 4%; dan 100%	3%; 4%; dan 109,77%	3%; 4%; dan 100%	3%; 4%; dan 94,47%	100,00%; 100,00%; dan 94,47%	3%; 4%; dan 100,00%	-	-





					5. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	75%	-	-
					6. Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	50%	-	-
					7. Persentase OPD Penghasilan yang Melaksanakan akan Hasil Komitmen (Target)	-	-	-	-	-	65%	-	-
					8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	-	-	-	-	-	80%	-	-
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah target PAD tahun N+1	552.737.611.191	632.842.772.808	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-



				Rencana Pengelolaan Pajak Daerah								
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah tersedianya peraturan/ Keputusan pajak dan retribusi daerah	4 Peraturan /Keputusa n	4 Peraturan/ Keputusan	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi	-	-	-	-	-



				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Sarana dan Prasarana	-	6 Sarana dan Prasarana	6 Sarana dan Prasarana	100%	2 Sarana dan Prasarana	-	-
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi obyek pajak daerah	27.000	26.491	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan	23.500	-	23.100 Laporan Hasil Pendataan	28.339 Laporan Hasil Pendataan	122.68%	23.500 Laporan Hasil Pendataan	-	-
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB	16.500	16.317	-	-	-	-	-	-



				Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya(Obyek Pajak)	12.000 Obyek Pajak	-	150.000 Obyek Pajak	151.529 Obyek Pajak	101,02%	12.000 Obyek Pajak	-	-
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani	15.000	7.291	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)	10.000 Wajib pajak	-	11.000 Wajib pajak	11.853 Wajib pajak	107,75%	10.000 Wajib pajak	-	-
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah evaluasi danLaporan pajak dan retribusi daerah	54 Evaluasi dan Laporan	54 Evaluasi dan Laporan	-	-	-	-	-	-



				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	250 Data Pelaporan Pajak Daerah	-	245 Data Pelaporan Pajak Daerah	247 Data Pelaporan Pajak Daerah	100,82%	252 Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak daerah	400.000.000.000	371.062.978.711	-	-	-	-	-
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	-
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa	110 Wajib Pajak	111 Wajib Pajak	-	-	-	-	-
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	140 Dokumen	-	130 Dokumen	211 Dokumen	162,31%	132 Dokumen	-	-



					serta Pengendalia n dan Pengawasan Pajak Daerah(Dok umen)							
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Target pajak dan retribusi daerah	700.000.0 00.000	616.647.95 2.230	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	-
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembang an Elektronifika si Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-



BerAKHLAK
Berakhlak Meliputi: Akhlak, Kompetensi,
Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2

Sasaran Strategi

Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,11%	-3,15%	-274,77%



Terjadi penurunan Persentase peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 dengan target sebesar 1,11% tercapai sebesar -3,15% atau dengan capaian kinerja -274,77%. Kondisi itu terjadi dikarenakan :

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dengan BPKAD Kab. Mojokerto tanggal 11 Januari 2024, maka bersama ini disampaikan laporan realisasi penerimaan PAD sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 656.067.091.001,54 atau (97,39%) dari target sebesar Rp. 673.662.919.222,09 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi berdasarkan Per Kelompok Pendapatan

NO	URAIAN	TARGET PAD P-APBD T.A 2023	REALISASI	SISA	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		673,662,919,222.09	656,067,091,001.54	17,595,828,220.55	97.39%
1	PAJAK DAERAH	391,174,190,020.00	369,537,744,691.00	21,636,445,329.00	94.47%
2	RETRIBUSI DAERAH	37,804,816,399.00	31,115,343,163.76	6,689,473,235.24	82.31%
3	HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10,417,837,280.09	10,417,837,280.95	(0.86)	100.00%
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	234,266,075,523.00	244,996,165,865.83	(10,730,090,342.83)	104.58%

2. Realisasi penerimaan berdasarkan per Perangkat Daerah Penghasil

NO	URAIAN	TARGET PAD 2023	REALISASI	SISA (Lebih/Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH		673,662,919,222.09	656,067,091,001.54	17,595,828,220.55	97.39%
1	DINAS PERTANIAN	1,000,000,000.00	1,540,387,100.82	(540,387,100.82)	154.04%
2	BPKAD	5,007,720,323.00	6,673,479,192.03	(1,665,758,869.03)	133.26%
3	DINAS TENAGA KERJA	2,501,042,400.00	3,281,058,100.00	(780,015,700.00)	131.19%
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,861,480,000.00	3,438,211,067.00	(576,731,067.00)	120.15%
5	RSUD. PROF. DR. SOEKANDAR	115,000,000,000.00	128,857,956,697.36	(13,857,956,697.36)	112.05%
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	100,000,000.00	100,500,600.00	(500,600.00)	100.50%
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	10,417,837,280.09	10,417,837,280.95	(0.86)	100.00%
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	942,085,000.00	942,085,000.00	-	100.00%
9	DINAS PENDIDIKAN	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
10	DINAS KESEHATAN	48,474,905,000.00	48,014,980,743.44	459,924,256.56	99.05%
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	391,715,867,220.00	370,987,401,773.00	20,728,465,447.00	94.71%
12	RSUD. R.A. BASOENI GEDEG	65,000,000,000.00	59,743,497,151.00	5,256,502,849.00	91.91%
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,884,137,840.00	3,467,359,130.40	416,778,709.60	89.27%
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	7,500,053,200.00	6,145,932,206.79	1,354,120,993.21	81.95%
15	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, OLAH RAGA DAN P	13,166,034,000.00	8,698,945,147.00	4,467,088,853.00	66.07%
16	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	6,064,756,959.00	3,730,459,811.75	2,334,297,147.25	61.51%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	0.00%

Dari realisasi penerimaan berdasarkan per Perangkat Daerah Penghasil diperoleh kesimpulan bahwa ada 7 (tujuh) perangkat



daerah penghasil yang tidak mencapai target realisasi 100% sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.730.459.811,75 atau (61,51%) kurang Rp. 2.334.297.147,25 dari target Rp. 6.064.756.959,00.

Dikarenakan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini menggunakan SIMBG, yang didalamnya harus sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan pengajuan/permohonan PBG banyak yang terkendala RTRW sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hal ini menyebabkan minimnya realisasi PBG.

2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 8.698.945.147,00 atau (66,07%) kurang Rp. 4.467.088.853,00 dari target Rp. 13.166.034.000,00.

Hal ini dikarenakan :

- a. Banyaknya wisata baru yang bermunculan seperti desa wisata dan wisata yang dikelola Swasta sehingga mengurangi kunjungan ke wisata yang di kelola pemerintah dan berdampak pada perolehan PAD.
- b. Objek Wisata yang dikelola oleh Pemkab belum ada inovasi yang signifikan, yang mampu menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.145.932.206,79 atau (81,95%) kurang Rp. 1.354.120.993,21 dari target Rp. 7.500.053.200,00.

Hal ini dikarenakan :



a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga berpengaruh pada retribusi parkir berlangganan realisasinya jadi menurun, walaupun sudah ada himbauan pemutihan.

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Dikarenakan adanya penerapan regulasi Zero Over Dimension OverLoading (ODOL) terhadap angkutan barang dimana kebanyakan melanggar dimensi sehingga mereka tidak mengujikan kendaraannya.

c. Retribusi Terminal

Dikarenakan jumlah kendaraan angkutan umum Mobil Penumpang Umum (MPU) setiap tahunnya semakin berkurang, dan banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum sehingga berpengaruh pada pemasukan Retribusi Terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dikarenakan banyak bermunculan tempat wisata baru yang dikelola swasta sehingga berpengaruh pada Retribusi Tempat Khusus Parkir pada obyek-obyek wisata yang dikelola oleh Pemkab. Mojokerto karena pengunjungnya berkurang.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.467.359.130,40 atau (89,27%) kurang Rp. 416.778.709,60 dari target Rp. 3.884.137.840,00.

Hal ini dikarenakan :

- a. Adanya pasar *online* yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar tradisional semakin menurun



- b. Banyak kios/los di pasar yang buka tutup karena kurangnya pembeli terutama untuk jenis dagangan yang menyediakan kebutuhan tambahan, seperti : konveksi, Sepatu/sandal, gerabah, elektronik, dll.

5. RSUD RA. Basoeni

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 59.743.497.151,00 atau (91,91%) kurang Rp. 5.256.502.849,00 dari target Rp. 65.000.000.000,00.

Dikarenakan Layanan Hemodialisa dan Poli Bedah Syaraf yang belum beroperasi sehingga mempengaruhi penerimaan BLUD di RSUD RA. Basoeni belum memenuhi target.

6. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 370.987.401.773,00 atau (94,71%) kurang Rp. 20.728.465.447,00 dari target Rp. 391.715.867.220,00

Hal ini dikarenakan :

a. BPHTB :

- 1) Transaksi jual beli tanah dan atau bangunan tidak bisa diprediksi.
- 2) Minimnya transaksi dari Perusahaan karena proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sulit sehingga sangat berpengaruh pada realisasi BPHTB, khususnya dari transaksi Perusahaan.

b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

- 1) Adanya piutang/tunggakan yang tidak terbayar/tertagih.
- 2) Belum terealisasinya pemungutan Pajak Minerba dari Penambang tidak berijin (Illegal).



c. Pajak Hiburan :

- 1) Proyeksi Potensi baru Objek Pajak Hiburan TA. 2023 belum bisa dipungut secara optimal.
- 2) Objek Pajak Hiburan yang dikelola oleh BUMDES masih belum bisa dipungut karena alasan operasional

7. Dinas Kesehatan

Realisasi penerimaan sebesar Rp. 48.014.980.743,44 atau (99,05%) kurang Rp. 459.924.256,56 dari target Rp. 48.474.905.000,00.

Dikarenakan jumlah kepesertaan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) menurun drastis sehingga mengakibatkan dana kapitasi ikut menurun.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pendapatan APBD	-	Rasio Pendap atan Asli Daerah	30%	30%	30%	30%	25,15%	30%	30%	30%	



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi PAD melalui perluasan obyek dan subyek pajak yang belum tercatat atau sudah terdaftar sebagai wajib/obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang melalui peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;
2. Evaluasi perda yang terus dilakukan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru dengan melihat kondisi daerah dengan memperhatikan aspirasi/masukan dari berbagai elemen baik dari dinas terkait maupun dari masyarakat. untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
3. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten Mojokerto.

4. Perbaikan sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. Perbaikan sistem dan prosedur tata



kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas pemungut.

5. Optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak daerah disebabkan karena pemberlakuan PPKM ditengah suasana Pandemi.
6. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah.
8. Sinergitas program kegiatan antar perangkat daerah terutama perangkat daerah penghasil guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

2.3.1 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;



4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto difokuskan pada pelayanan Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sebagai perangkat daerah dengan fungsi penunjang urusan bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki konsentrasi tugas pada pengelolaan PAD khususnya sektor Pajak Daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan dengan cara menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak secara optimal, melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan diskon/bebas denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah. Pemberian diskon/bebas denda tersebut diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk membayar piutang pajak daerah;
2. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak;
3. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah, dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan pajak daerah;



4. Menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Daerah, untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan khususnya dalam fungsi penunjang urusan bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selalu berkoordinasi dan bersinergi program dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu Persentase PAD terhadap Total Pendapatan selaras dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pendapatan APBD.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto yaitu Rasio Kemandirian Ekonomi maka diperlukan koordinasi secara terus menerus dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbas pada



peningkatan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor ini menjadi salah satu pemicu wajib pajak untuk menunda, bahkan tidak membayarkan pajaknya. Selain itu kurangnya informasi penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat;
2. Dari ketidaksadaran dan ketidakpatuhan wajib pajak mengakibatkan timbulnya piutang pajak daerah yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan bahwa hasil kegiatan pemeriksaan pajak belum dilakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
3. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan untuk menuju kemandirian ekonomi;
4. Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal;
5. Sarana dan Prasarana kerja perlu diremajakan dan ditingkatkan;
6. Terbatasnya dana/anggaran penunjang kegiatan;



7. Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan terutama dalam menyikapi perubahan peraturan pengelolaan keuangan yang dinamis.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Mojokerto, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif
- MISI 2 Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan;
- MISI 4 Pemerataan dan Perluasan Pembanguann Infrastruktur di Semua Sektor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan pelestarian.

2.3.3.1 Dampak pada Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan asli daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 2 (dua) Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.”. Mengusung sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan



Asli Daerah” dengan indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target 1,11% di tahun 2023 tercapai -3,05% yang tumbuh negatif karena tidak optimalnya penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian dari misi ke-2 (dua) Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto di tahun 2023 dengan target 30% hanya tercapai 25,57%.

2.3.3.2 Dampak pada Program Nasional/Internasional

Dalam hal dampak pada Program Nasional/Internasional sebagai berikut :

1. Dampak Program Nasional

- a. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik atas tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2023 memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,63 dengan kategori Sangat Baik. IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

- b. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

2. Dampak Program Internasional (SDG's)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengusung Pilar ke-17 yaitu Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Dengan target *“Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya”*. Dengan indikator dan target sebagai berikut :

1. Rasio penerimaan PAD terhadap APBD ; 30%
2. Rasio penerimaan PAD terhadap PDRB ; 0,93%
3. Proporsi APBD yang didanai oleh PAD ; 25,25
4. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah ;
Rp 391.174.190.020,00

Di tahun 2023 ke-4 (empat) indikator tersebut di atas masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini akan menjadikan evaluasi untuk tahun ke depannya menjadi lebih baik lagi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah



3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan dan antar Perangkat Daerah Penghasil;
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dan Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan yang terbaru/update untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mojokerto.
5. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) pada pasal 4a ayat 2 bahwa Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan)
 - 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



- 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
- 4) PAT (Pajak Air Tanah)
- 5) Pajak MBLB (Mineral Bukan LOGam dan Batuan)
- 6) Pajak Sarang Burung Walet
- 7) Opsen PKB
- 8) Opsen BBNKB

Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.

Peraturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak. Di samping itu, opsen PKB dan BBNKB juga diyakini dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi. Pasalnya, penyebab tingginya SiLPA di provinsi selama ini sering dikarenakan keterlambatan pendistribusian dana bagi hasil (DBH). Dengan opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Dengan adanya beberapa penambahan kewenangan atas pemungutan pajak Daerah tersebut, sudah sepantasnya kita yang berada di jajaran



Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Sinergi dan kolaborasi dimaksud dapat diimplementasikan melalui pertukaran data dan informasi berkaitan dengan Pajak Daerah, sinergi pembiayaan, penugasan bersama personil untuk melakukan pendataan dan penagihan di lapangan maupun penyiapan sarana dan sarana pendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Mengingat pelaksanaan dimulainya secara efektif pemungutan jenis pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tanggal 5 Januari tahun 2025 maka dalam *Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025* Badan Pendapatan Daerah memasukkan tambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan dimaksud.

6. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2023 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan potensi objek



pajak daerah dan asumsi lainnya ditengah program pemulihan ekonomi nasional;

2. Penghitungan kebutuhan terhadap Belanja Pegawai, Modal dan Belanja Operasional berdasarkan prioritas yang diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD Badan Pendapatan Daerah dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan.



Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP OPD	84,80	26.468.500.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP OPD	84,80	33.835.922.332,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	21.700.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	26.000.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	21.700.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	26.000.000.000,00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalisme ASN	80	448.150.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalisme ASN	80	655.922.332,00	



BerAKHLAK
Berakhlak Melaksanakan Kurikulum Kompetensi
Harmonis Loyal Adaptif Inovasi

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	53.900.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.238.603,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	29.080.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	40.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	44.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	108.683.729,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75 Orang	321.170.700,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75 Orang	450.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.378.877.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.800.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	349.819.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	500.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.771.350,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	542.845.750,00	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	1.600.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	600.267.775,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	143.893.200,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	150.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	378.983.900,00	Penyediaan Bahan Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	800.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.291.500,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.004.825,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	226.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	800.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel	5 Paket	226.800.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel	5 Paket	300.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	510.907.440,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	480.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	302.167.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.740.240,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	1.203.763.960,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	1.100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	484.045.900,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	500.000.000,00	



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	178.587.300,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	178.587.300,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	541.130.760,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	541.130.760,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	1. 100% 2. 87 3. 1 Inovasi	4.631.500.000,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	4. Porsentase Realisasi Penerimaan PAD 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	4. 100% 5. 87 6. 1 Inovasi	4.631.500.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	65%	4.631.500.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	65%	4.631.500.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	3%				2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	3%		
			3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	100%				3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	100%		
			4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	80%				4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	80%		
			5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%				5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%		
			6. Porsentase Realisasi Tunggal Pajak Daerah	50%				6. Porsentase Realisasi Tunggal Pajak Daerah	50%		



BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Bangsa

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Persentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target Persentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	65%				7. Porsentase OPD Penghasil yang Melaksana kan Hasil Komitmen (Target Porsentase OPD Penghasil yang Melaksana kan Hasil Komitmen (Target)	65%		
			8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	80%				8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	80%		



BerAKHLAK
Berakhlak Melaksanakan Kurikulum Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	105.137.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	105.137.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	440.500.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	440.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.260.800.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.260.800.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katans Tanah dan Bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	1.200 OP	310.200.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katans Tanah dan Bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	1.200 OP	310.200.000,00	



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.000 Layanan	489.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.000 Layan an	489.000.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	252 Dokumen	51.300.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	252 Dokumen	51.300.000,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	4 Doku men	1.700.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	4 Doku men	1.700.000.000,00	
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	135 Doku men	97.895.000,00	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	135 Doku men	97.895.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	11.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	11.000.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	165.668.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	165.668.000,00	



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten
Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan	0,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan	0,00	
			JUMLAH		31.100.000,00				JUMLAH	31.100.000,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berkeadilan | Berkomitmen
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV (terakhir) dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.



Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang sudah mulai disusun mulai bulan November 2023 untuk merencanakan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang berfokus menyusun strategi pembangunan transformatif dan agenda pembangunan. Salah satu prioritas pembahasan raker adalah penajaman arah kebijakan kewilayahan dan dukungan sarana prasarana, sebagai respons atas hasil evaluasi yang menyatakan bahwa secara rata-rata, dua per tiga kebijakan daerah masih belum sesuai dengan perencanaan pusat. Sebagai upaya memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan di wilayah serta dukungan sarana prasarana tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan transformatif menjadi landasan bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.



3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Mojokerto, tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah masuk pada misi ke-2 yaitu Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2025
1	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Target PAD Tahun n – Target PAD tahun n-1/Target PAD Tahun n-1 x 100%	1,00%

3.3 Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan



terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 31.100.000.000,00

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pendapatan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto
Badan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Output	Outco me					
1				2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto		84,80 (A)	26.468.500.000,00	PAD		84,90 (A)	32.831.351.841,00
			1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto		91%	26.468.500.000,00	PAD		91%	27.866.114.591,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASD	Kab. Mojokerto		45 Orang	26.468.500.000,00	PAD		45 Orang	27.866.114.591,00



				2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Mojokerto		80	448.150.700,00	PAD		80	387.296.546,00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	50 Paket		53.900.000,00	PAD		62 Paket	61.245.305,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Mojokerto	4 Orang		29.080.000,00	PAD		6 Orang	33.000.000,00
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	200 Orang		44.000.000,00	PAD		200 Orang	44.000.000,00
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	75 Orang		321.170.700,00	PAD		75 Orang	249.051.241,00
				3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto		100%	2.378.877.900,00	PAD		100%	2.075.202.595,00



				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	6 Paket		349.819.600,00	PAD		6 Paket	786.477.606,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket		15.771.350,00	PAD		3 Paket	16.500.000,00
				Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	96 Paket		542.845.750,00	PAD		29 Paket	89.406.118,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket		600.267.775,00	PAD		2Paket	259.537.609,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen		143.893.200,00	PAD		12 Dokumen	181.642.712,00
				Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket		378.983.900,00	PAD		3 Paket	260.848.405,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	12 Laporan		47.291.500,00	PAD		12 Laporan	87.551.342,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 Laporan		300.004.825,00	PAD		12 Laporan	393.238.803,00



			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Mojokerto		100%	226.800.000,00	PAD		100%	393.238.803,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kab. Mojokerto	5 Paket		226.800.000,00	PAD		5 Paket	393.238.803,00
				Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 Unit		0,00	PAD		1 Unit	0,00
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Mojokerto		100%	510.907.440,00	PAD		100%	689.877.469,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan		302.167.200,00	PAD		12 Laporan	390.491.661,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan		208.740.240,00	PAD		12 Laporan	299.385.808,00



				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Mojokerto		100%	1.203.763.960,00	PAD		100%	1.419.621.837,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	100 Unit		484.045.900,00	PAD		100 Unit	984.624.576,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	70 Unit		178.587.300,00	PAD		70 Unit	192.500.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	6 Unit		541.130.760,00	PAD		6 Unit	242.497.261,00
2					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	Kab. Mojokerto		7. 100% 8. 87 9. 1 Inovasi	4.631.500.000,00	PAD		100%	18.322.000.000,00
				7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	Kab. Mojokerto		65%	4.631.500.000,00	PAD		65%	9.046.253.004,00



						2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	Kab. Mojokerto		3%		PAD		3%	
						3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	Kab. Mojokerto		100%		PAD		100%	
						4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	Kab. Mojokerto		80%		PAD		80%	
						5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto		75%		PAD		75%	
						6. Porsentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto		50%		PAD		50%	
						7. Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	Kab. Mojokerto		65%		PAD		65%	
						8. Porsentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	Kab. Mojokerto		80%		PAD		80%	



					1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Dokumen		105.137.000,00	PAD		2 Dokumen	308.125.541,00
					2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Unit		440.500.000,00	PAD		2 Unit	706.643.575,00
					3	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan		1.260.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.617.408.564,00
					4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Kab. Mojokerto	1.200 OP		310.200.000,00	PAD		1.200 OP	319.790.970,00
					5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	11.000 Layanan		489.000.000,00	PAD		1.000 Layanan	170.771.814,00
					6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Mojokerto	252 Dokumen		51.300.000,00	PAD		250 Dokumen	117.185.163,00



					7	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	4 Dokumen		1.700.000.000,00	PAD		4 Dokumen	4.758.189.516,00
					8	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	135 Dokumen		97.895.000,00	PAD		135 Dokumen	522.159.654,00
					9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	2 Laporan		11.000.000,00			2 Laporan	343.743.407,00
					10	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan		165.668.000,00			12 Laporan	182.234.800,00
					11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	7 Laporan		0,00			7 Laporan	0,00
						JUMLAH					31.100.000.000,00				41.877.604.845,00



BerAKHLAK
Berprestasi Berprestasi Berprestasi Berprestasi
Berprestasi Berprestasi Berprestasi Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:



Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

Kode Rekening			Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Rencana Kerja 2025					
SKPD			Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1		2		3	4	5	6	7	8
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	84,80	26.468.500.000,00	PAD	
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	90%	21.700.000.000,00	PAD	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	45 Orang/ Bulan	21.700.000.000,00	PAD	
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Mojokerto	80	448.150.700,00	PAD	
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	1 Paket	53.900.000,00	PAD	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Mojokerto	4 Orang	29.080.000,00	PAD	



			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	200 Orang	44.000.000,00	PAD	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	75 Orang	321.170.700,00	PAD	
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	100%	2.378.877.900,00	PAD	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	6 Paket	349.819.600,00	PAD	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket	15.771.350,00	PAD	
			Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	96 Paket	542.845.750,00	PAD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket	600.267.775,00	PAD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	143.893.200,00	PAD	
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket	378.983.900,00	PAD	



			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	12 Laporan	47.291.500,00	PAD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 Laporan	300.004.825,00	PAD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Mojokerto	100%	226.800.000,00	PAD	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kab. Mojokerto	5 Paket	226.800.000,00	PAD	
			Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 Unit	0,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Mojokerto	100%	510.907.440,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	302.167.200,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	208.740.240,00	PAD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Mojokerto	100%	1.203.763.960,00	PAD	



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	100 Unit	484.045.900,00	PAD	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	70 Unit	178.587.300,00	PAD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	6 Unit	541.130.760,00	PAD	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	Kab. Mojokerto	1. 100% 2. 87 3. 1	4.631.500.000,00	PAD	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	Kab. Mojokerto	65%	4.631.500.000,00	PAD	
				2. Persentase Peningkatan Potensi PAD	Kab. Mojokerto	3%		PAD	
				3. Persentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	Kab. Mojokerto	100%		PAD	
				4. Persentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	Kab. Mojokerto	80%		PAD	



				5. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	75%		PAD	
				6. Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	50%		PAD	
				7. Persentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	Kab. Mojokerto	65%		PAD	
				8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	Kab. Mojokerto	80%		PAD	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	105.137.000,00	PAD	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Unit	440.500.000,00	PAD	
			Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan	1.260.800.000,00	PAD	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Kab. Mojokerto	1.200 OP	310.200.000,00	PAD	



			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	11.000 Layanan	489.000.000,00	PAD	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Mojokerto	252 Dokumen	51.300.000,00	PAD	
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	4 Dokumen	1.700.000.000,00	PAD	
			Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	135 Dokumen	97.895.000,00	PAD	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	2 Laporan	11.000.000,00	PAD	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan	165.668.000,00	PAD	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	7 Laporan	0,00	PAD	Subkegiatan baru
				JUMLAH			31.100.000.000,00		



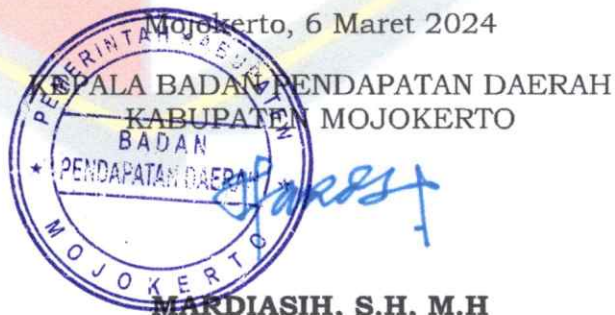
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

Penyusunan *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam *Rencana Kerja* Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 6 Maret 2024



MARDIASIH, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 199703 2002